

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI DAN AKTUALISASI PERANNYA DALAM PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

Tatang Sudrajat

Dosen Tetap Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP/
Pacasarjana Magister Ilmu Pemerintahan UNJANI
Dosen Luar Biasa STIA LAN Bandung
Email: t.sudrajat@yahoo.com

College Improvement Policy And It's Roles In Government And Development

Abstract

The existency of college in the country is very strategic. College has provided contributive role to the development and sustainable government. The future generation will be born from there. The generation which is capable of moving wheels of government and development. Therefore, policy for development will be very important, besides the consistency of policy implementation and continuous evaluation.

Key word: college, policy, development, government

A. PENDAHULUAN

Untuk mencapai cita-cita sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945, Bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan nasional. Upaya ini diperlukan mengingat selepas dari penjajahan, kondisi bangsa sangat memprihatinkan. Dalam perjalanan sejarah bangsa ini, sudah cukup banyak konsep, strategi, gagasan dan kebijakan pembangunan yang telah dan akan digulirkan pada saat ini dan terutama di masa depan. Pada proses pembangunan multidimensional seperti pembangunan nasional dibutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita bangsa. Secara konsepsional dan teknis, penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional.

Langkah sistematis dan besar bangsa ini merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Terdapat berbagai aspek kehidupan bangsa yang menjadi garapan pembangunan nasional ini yang meliputi bidang hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial

budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam, dan lingkungan hidup serta pertahanan keamanan.

Sangat luasnya bidang-bidang pembangunan nasional, yang membutuhkan manusia-manusia pembangunan, baik sebagai perencana, pelaksana maupun pengawas pembangunan, jelas mengindikasikan keharusan tersedianya manusia-manusia pembangunan dengan kualifikasi tertentu. Diyakini bahwa hanya dengan kualifikasi dan kompetensi yang melekat pada setiap aparatur pembangunan inilah pembangunan nasional akan menemukan maknanya. Terlahirnya kualitas manusia yang diharapkan ini salah satu sumbernya adalah perguruan tinggi yang menyediakan tenaga-tenaga pembangunan melalui proses pendidikan tinggi.

Di era reformasi ini, munculnya berbagai tantangan, permasalahan, bahkan ancaman dan gangguan terhadap pelaksanaan pembangunan nasional dari hari ke hari semakin besar dan kompleks. Seandainya hal ini tidak dicermati dengan baik oleh segenap lapisan masyarakat, maka tidak mustahil justru akan menghambat, bahkan menggagalkan tujuan-tujuan dan sasaran pembangunan. Apabila hal itu yang terjadi, maka akan semakin jauhlah cita-cita nasional yaitu masyarakat adil dan makmur untuk tercapai. Tentu saja pada giliran berikutnya, hal ini akan berimplikasi pada

kredibilitas dan legitimasi pemerintahan. Sebab, pembangunan merupakan salah satu fungsi hakiki dari pemerintahan.

Tersedianya sumber daya manusia sebagai tenaga-tenaga pemerintahan dan pembangunan yang handal merupakan sesuatu yang tidak dapat ditunda-tunda. Salah satu kontributor penyediaan sumber daya ini adalah perguruan tinggi. Dirinya sebagai institusi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan tiga aktivitas utamanya, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, jelas memegang posisi dominan dan strategis. Bahkan menurut UNESCO, sebagaimana dikutip oleh Tilaar (1999), perannya di negara-negara berkembang lebih berat lagi. Hal ini disebabkan karena pendidikan tinggi boleh dikatakan merupakan sumber satu-satunya bagi pengembangan ekonomi, sumber binaan para pemimpin bangsa, para birokrat negara dan sumber tenaga kerja tingkat tinggi.

Berbagai langkah untuk investasi dalam rangka mendukung pemerintahan dan pembangunan sangat diperlukan. Upaya besar membangun sumber daya manusia, termasuk yang dilakukan melalui pendidikan tinggi ini merupakan investasi human capital yang harus dilakukan sejalan dengan investasi *physical capital*. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Becker (1993), bahwa *education and training are the most important investments in human capital*. Investasi ini bernilai futuristik yang hasilnya baru akan dinikmati setelah kurun waktu satu atau beberapa generasi ke depan.

Sangat disadari bahwa bukan pekerjaan mudah untuk meyakinkan berbagai pihak tentang arti penting investasi ini. Adanya kesadaran pentingnya investasi sumber daya ini, harus muncul pada semua level birokrasi pemerintahan dan pembangunan. Pada kenyataannya, dengan sangat jelas hal ini tampak pada berbagai negara yang menempati peringkat teratas dalam kualitas sumber daya manusia, sebagaimana tertuang dalam *Human Development Report 2000* dari *United Nations Development Program* (UNDP). Meskipun pada tahun 2001 Indonesia menempati peringkat 102, tetapi setahun sebelumnya (2000) berada urutan 109 dari 174 negara yang dilaporkan. Fakta ini sudah semestinya menjadi cambuk bagi berbagai elemen bangsa, khususnya yang memegang otoritas bagi pengembangan sumber daya manusia untuk melakukan yang terbaik bagi kejayaan bangsa.

Terkait dengan itu, kebijakan negara atau pemerintah untuk tampilnya sosok perguruan tinggi sebagaimana harapan publik tentu akan selalu aktual untuk dibahas. Sebagai institusi, dirinya tidak berada pada ruang hampa udara. Banyak variabel eksternal yang berpengaruh terhadap sosok dan perannya di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

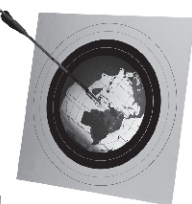
Berdasarkan latar belakang pemikiran itu, tulisan ini akan mengelaborasi kebijakan eksistensi dan aktualisasi peranan pendidikan bagi kegiatan pemerintahan dan pembangunan, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mewujudkan perguruan tinggi sebagai pemasok kebutuhan pemerintahan dan pembangunan?
2. Bagaimana eksistensi dan aktualisasi peran perguruan tinggi dalam membangun sumber daya manusia?
3. Bagaimana proses pemerintahan dan pembangunan nasional yang melibatkan sumber daya manusia sebagai faktor sentral dan strategis?
4. Bagaimana kontribusi nyata pendidikan tinggi dalam menyiapkan sumber daya berkualitas bagi aktivitas pemerintahan dan pembangunan nasional?

B. KEBIJAKAN PEMERINTAH MEWUJUDKAN PERGURUAN TINGGI SEBAGAI PEMASOK KEBUTUHAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

Sebagai salah satu garda terdepan dalam membangun sumber daya manusia, perguruan tinggi membawa dan menyimpan misi yang strategis dan deterministik bagi kemajuan dan masa depan bangsa. Terkait dengan itu, negara atau pemerintah sebagai pengemban amanat rakyat memiliki komitmen tinggi untuk menjadikan perguruan tinggi benar-benar kontributif bagi kemanusiaan dan peradaban, bukan saja dalam konteks lokal, tetapi nasional, regional bahkan internasional.

Oleh karenanya, sejak NKRI berdiri, telah banyak perhatian dan kebijakan negara diarahkan bagi terwujudnya tujuan ini sesuai dengan dinamika dan kapabilitas pemerintah di setiap jamannya. Dalam konteks kepentingan publik, hal ini pada dasarnya merupakan kebijakan publik (*public policy*) yang oleh Dunn (1981) didefinisikan sebagai *long series of more or less related choice (including decisions not to act)*



made by government bodies and officials, are formulated in issue areas which range from defence, energy and health to education, welfare, and crime control.

Dengan demikian, pendidikan (*education*) merupakan salah *issue area* atau *substantive area* (Dye, 1987) dari kebijakan-kebijakan negara atau pemerintah. Salah satu segi dari kebijakan tersebut adalah tentang pendidikan tinggi (*higher education*).

Dari hari ke hari, perguruan tinggi dihadapkan kepada berbagai persoalan, yang menuntut konsistensi dan terobosan dalam pengelolaannya. Pada sisi lain, negara atau pemerintah dengan otoritasnya dituntut membuat berbagai keputusan atau kebijakan untuk tampilnya perguruan tinggi yang berkualitas serta berkemampuan kompetitif dalam percaturan global.

Oleh karena itu, dengan adanya tantangan yang semakin besar dalam mengaktualisasikan fungsi-fungsi strategis pendidikan tinggi, Supriyoko (2001) mengusulkan beberapa kebijakan yang ditempuh, sebagai berikut:

- a. Perguruan tinggi di Indonesia harus dikelola secara bisnis dengan mengaplikasi manajemen yang profesional.
- b. Otonomi perguruan tinggi kita harus dijalankan secara konkrit dan proporsional.
- c. Sistem evaluasi dan akreditasi harus dikembangkan ke arah yang lebih objektif dan transparan.
- d. Proses belajar mengajar atau sistem perkuliahan di perguruan tinggi hendaknya disampaikan dengan memakai Bahasa Inggris sebagai bahasa Internasional.
- e. Pimpinan perguruan tinggi harus selektif terhadap kualifikasi para dosennya. Hanya mereka yang berkualifikasi master, magister, dan doktor yang berhak mengajar pada perguruan tinggi.

Pada amandemen UUD 1945, khususnya yang terkait bidang pendidikan pada tahun 2001 telah menjadi *entry point* bagi tumbuh dan berkembangnya berbagai kebijakan negara yang lebih operasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi payung hukum bagi berbagai kebijakan pemerintah, baik pada *organizational level* maupun *operational level*. Pada tataran yang lebih spesifik, dipersiapkannya saat ini Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi oleh DPR dan Pemerintah tentu dapat dan harus dipandang sebagai wujud

responsivitas terhadap perkembangan nasional, regional, dan global yang sangat pesat.

Kebijakan untuk mengembangkan perguruan tinggi, dari perspektif organisasi salah satunya dapat dilihat dari sampai sejauh mana dirinya dapat mencapai tujuan-tujuannya. Dengan kata lain, hal ini terkait dengan apa yang disebut Robiins (1990) sebagai *organizational effectiveness*. Dalam konteks organisasi perguruan tinggi tentu saja efektivitas ini harus dimaknai sebagai upaya bagaimana dirinya sebagai institusi mampu mengevaluasi diri secara internal terhadap berbagai aspek penyelenggaraan fungsi-fungsi utama perguruan tinggi.

Sebagai bahan analisis, kiranya dapat digunakan apa yang dinyatakan Kim Cameron sebagai dimensi atau indikator dalam mengukur efektivitas organisasi universitas, yaitu *student educational satisfaction, student academic development, student career development, faculty and administrator employment satisfaction, professional development and quality of the faculty, system openness and community interaction, ability to acquire resource and organizational health* (Narayanan dan Nath, 1993).

Dengan demikian, lahirnya berbagai kebijakan pemerintah untuk meregulasi pendidikan tinggi, baik dari aspek institusi, sumber-sumber daya organisasi, norma, dan sistem pembelajaran serta akuntabilitasnya kepada publik menjadi suatu yang sangat penting. Tidak kalah dan jauh lebih penting lagi adalah konsistensi dalam implementasinya, serta evaluasi secara obyektif dan sinambung terhadap capaian berbagai aspek indikator kinerjanya.

Untuk itu, perubahan budaya dan iklim organisasi pendidikan tinggi dari yang semula lebih mencirikan birokratik, legalistik, dan formalistik menjadi organisasi yang egaliter, demokratik dan humanis, perlu menjadi perhatian utama. Mekanisme pengambilan keputusan dan kepemimpinan yang cenderung menggunakan cara-cara kekuasaan dalam kerangka kerja atasan-bawahan harus segera diubah menjadi cara-cara yang berorientasi kepada *team work*. Hal ini sejalan dengan salah satu ciri dari paradigma baru pendidikan tinggi yang menekankan arti pentingnya proses pengambilan keputusan yang partisipatif. Jalan menuju ke arah sana tampaknya penuh dengan rintangan. Kesadaran akan pentingnya kaderisasi pimpinan pada berbagai lini organisasi demi kesinambungan pencapaian

misi organisasi, khususnya di banyak PTS, tampaknya masih banyak yang melupakan hakikat dasar organisasi perguruan tinggi.

Kegiatan penelitian (riset) yang menjadi salah satu roh dari perguruan tinggi merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan teknologi dan/atau kesenian. Kegiatan riset ini, baik yang tergolong riset akademik, riset institusional maupun riset kontraktual telah memberikan sumbangan nyata bagi pembangunan nasional. Dengan penelitian pula, perguruan tinggi mampu mengembangkan dan mengaplikasikan temuan-temuan ipteknya bagi kemaslahatan umat manusia. Apalagi bila mengingat bahwa secara aksiologis ilmu pengetahuan itu memang tercipta untuk kepentingan manusia, kemanusiaan dan peradaban.

Dari aspek ini, realita yang muncul masih dominan berupa bentuk-bentuk kegiatan yang lebih berorientasi proforma belaka atau yang bermotif hal-hal finansial. Artinya dalam kegiatan riset bukan berlandaskan kebutuhan akademis dan pengembangan institusi, tetapi lebih kepada pertimbangan-pertimbangan personal. Aktivitas pengabdian kepada masyarakat bagaimanapun merupakan bagian penting dalam upaya membangun bangsa. Digulirkannya berbagai program baik yang bersifat mandiri maupun kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan industri, khususnya yang bertujuan pengembangan sumber daya manusia telah banyak dilakukan. Berbagai program pelatihan terutama yang mengembangkan keterampilan telah pula dilakukan. Dalam kaitan ini, program Kuliah Kerja Nyata yang secara institusional telah berlangsung di berbagai pedesaan oleh berbagai perguruan tinggi, dapat dipandang pula sebagai upaya nyata ke arah pengembangan sumber daya manusia.

C. EKSISTENSI DAN AKTUALISASI PERANAN PENDIDIKAN TINGGI DALAM MEMBANGUN SUMBER MANUSIA

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa pendidikan tinggi mempunyai tujuan yaitu:

- a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat

menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.

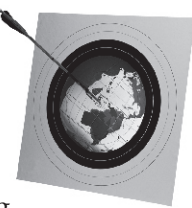
- b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Terkait dengan itu, beragam hal dapat dilakukan perguruan tinggi dalam memberikan karya terbaik bagi bangsa dan negara. Namun demikian terdapat tiga aktivitas utama penyelenggaraannya, yaitu pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Aktivitas-aktivitas tersebut berpedoman kepada tujuan pendidikan nasional, kaidah moral dan etika ilmu pengetahuan, kepentingan masyarakat dan memperhatikan minat, kemampuan dan prakarsa pribadi.

Berdasarkan hal tersebut, sudah sangat jelas kiranya bahwa tidak ada pilihan lain bagi bangsa ini untuk meraih kemajuan peradaban kecuali dengan pendidikan. Apresiasi terhadap hal ini berarti memberikan arti yang sangat penting terhadap upaya lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas, bukan hanya dari aspek teknis profesionalisme, tetapi juga dari aspek integritas moral dan personal.

Menurut Supriyoko (2001), meskipun lembaga yang didirikan Plato di Athena dan bernama Academia ini sampai dengan sekarang telah melewati masa sejarah sekitar 23 abad, tetapi tujuan utamanya tidak pernah berubah, yaitu meningkatkan kualitas manusia supaya dapat berperan secara konkret dan konstruktif di tengah-tengah masyarakat. Keterlibatannya dalam menangani masalah-masalah kemasyarakatan dengan sendirinya tidak dapat lagi dihindarkan. Institusi ini, dengan proses pendidikan tingginya merupakan menara api yang menerangi wilayah-wilayah gelap sekitarnya. Dengan demikian, aktivitas yang disebut Tridharma Perguruan Tinggi semakin nyata kontribusinya terhadap pembangunan bangsa.

Sepanjang sejarahnya, lembaga pendidikan tinggi memang senantiasa tampil paling depan dalam menangani permasalahan masyarakat. Meskipun kadang-kadang timbul pengaruh luar yang mencoba memposisikannya agar dependen bahkan insubordinatif terhadap kekuasaan, tetapi secara umum sebenarnya tidak pernah bergeser dari peran mulianya tersebut.



Soejanto Poespowardjo mengemukakan hubungan antara lembaga pendidikan tinggi dengan kehidupan sosial, yang tidak dapat menjadikannya hanya menjadi penonton atau mungkin sebagai pengkritik kejadian-kejadian sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (dalam Tilaar, 1994). Hal ini berarti, inovasi, kreativitas dan responsivitas yang tinggi sangat diperlukan untuk menangani problematika-problematika pembangunan yang semakin meningkat, baik intensitas maupun ekstensitasnya. Lebih lanjut dinyatakan oleh Poespowardjo bahwa apabila fakta dan realita dalam masyarakat merupakan teks maka merupakan tugas pendidikan tinggi untuk menganalisa teks itu dalam suatu konteks yang berarti. Hal ini berarti bahwa fakta-fakta itu perlu dikaji relasinya dengan kehidupan sosial budaya bangsa secara keseluruhan (Tilaar, 1999).

Berkaitan dengan kenyataan dan bangsa saat ini, yang belum mampu keluar dari krisis multidimensi, telah memposisikan perguruan tinggi dalam tugas yang sangat berat untuk berkemauan dan berkemampuan melihat teks yaitu fakta dan realita gejala-gejala sosial. Kemampuan perguruan tinggi ini, menurut Tilaar (1999) hanya akan dapat ditingkatkan apabila syarat-syarat minimal suatu perguruan tinggi sudah dipenuhi antara lain prasarana kampus yang memadai, peralatan laboratorium, perpustakaan yang berfungsi dan armada dosen yang siap tempur, artinya yang punya dedikasi dengan kemampuan profesional yang tinggi.

Pada bidang pendidikan dan pengajaran, khususnya pada era setelah kemerdekaan, dengan jumlah perguruan tinggi (PTN, PTS dan PTK) yang tersebar di berbagai tempat, cukup banyak yang telah disumbangkan dalam membangun sumber daya manusia Indonesia ini. Beberapa program studi pada berbagai jenjang pendidikan, telah secara nyata memberi andil kepada pembangunan bangsa dan negara. Sebagai angka perbandingan, jumlah generasi muda bangsa yang menikmati perguruan tinggi, sebagaimana dikemukakan Supriadi (1997), sampai dengan akhir Repelita V berjumlah 2,2 juta orang yang sebagian besar berada di PTS.

Keadaan menggembirakan ini tampaknya selaras dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat yang semakin memberi arti penting terhadap pendidikan. Indikatornya bukan saja pada semakin difahaminya fungsi pendidikan bagi peningkatan kualitas hidup, tetapi juga dalam bentuk peningkatan partisipasi. Kesadaran ini terutama apabila dikaitkan

dengan kenyataan bahwa memasuki era yang semakin mengglobal dituntut lahirnya manusia-manusia yang semakin kompetitif dan berkualitas. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Johns dan Morphet (1995) bahwa *since the beginning of the industrial revolution, we have changed from a labor intensive society to capital intensive and now, through the science of cybernetics, we are evolving into a brain intensive society. Our total social system will require in the future proportionality a greater increase in the investment in human capital than in physical capital.*

Aktualisasi peranan ini memang tidak terlepas dari berbagai kecenderungan. Kecenderungan ini menurut Tilaar (1999) terdiri dari sebagai berikut:

- a. Pendidikan tinggi akan semakin menuntut partisipasi masyarakat umum di dalam pembiayaannya.
- b. Memerlukan perhatian yang lebih besar terhadap penggunaan sumber secara efektif.
- c. Suatu perguruan tinggi modern memerlukan pemikiran dan kepemimpinan yang lebih pluralistik, dalam arti *team work* karena keanekaragaman masalah yang dihadapi oleh perguruan tinggi sebagai lembaga sosial (*social organization*).
- d. Pengembangan perguruan tinggi masa depan membutuhkan suatu gerakan jangka panjang dan tidak terikat kepada rencana-rencana jangka pendek belaka.
- e. Perlunya perlindungan terhadap fungsi-fungsi non-market perguruan tinggi. Studi-studi sosial, moral keagamaan dan filsafat merupakan studi-studi non market yang perlu dipertahankan, dilindungi dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.

Dari aspek pembiayaan, kontribusi sektor non pemerintah jelas dari hari ke hari semakin besar. Hal ini selain tercermin dari semakin bertambahnya jumlah PTS dengan tetap mempertahankan mutu, juga pada kondisi nyata tertopangnya operasional akademik oleh pihak masyarakat. Sehingga, efektivitas dan efisiensi pengelolaan semakin dirasakan penting. Demi aktualisasi peran yang lebih maksimal, kepemimpinan dengan visi dan strategi yang futuristik tidak terhindarkan lagi. Munculnya perilaku berorientasi kepentingan sesaat dan perilaku pragmatis avonturir yang menggadaikan idealisme pendidikan harus segera diakhiri.

Dalam kaitan supervisi ini, perlu ditekankan bahwa penataan pendidikan tinggi memerlukan

upaya serius untuk terus berorientasi kepada kualitas. Studi yang dilakukan oleh UNESCO, sebagaimana dikutip oleh Tilaar (1999), mengemukakan unsur-unsur yang perlu mendapatkan perhatian dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi, yaitu:

- a. Kaderisasi tenaga dan pimpinan perguruan tinggi.
- b. Bagaimana mengolah sumber-sumber daya yang ada di dalam suatu perguruan tinggi.
- c. Administrasi sebagai unsur yang biasanya dianaktirikan hendaknya diubah karena *administration* dalam arti *to serve* akan menentukan berhasil tidaknya misi suatu perguruan tinggi.
- d. Kelembagaan, bahwa pendidikan tinggi merupakan lembaga sosial yang unik yang mengawinkan manajerial dengan kemampuan akademik.

Dalam kaitan supervisi dan evaluasi kebijakan dari pemerintah sebagai pemegang otoritas menjadi strategis. Implementasi kebijakan pengembangan perguruan tinggi yang konsisten tentu akan berdampak positif bagi aktualisasi perannya dalam pembangunan. Saat ini dan di masa depan, perguruan tinggi dituntut untuk lebih mengaktualisasikan perannya. Secara internal, permasalahan bangsa semakin kompleks yang dibarengi oleh berbagai tuntutan darinya agar perguruan tinggi semakin banyak berkiprah. Secara eksternal, perkembangan lingkungan global juga menghadapkan dirinya pada suasana yang semakin kompetitif.

Dengan demikian, untuk berfungsinya perguruan tinggi dengan layak, diperlukan semangat dan kemampuan entrepreneurial yang tinggi. Institusi ini bukan saatnya lagi dikelola dengan cara-cara konvensional dan amatiran. Dalam rangka ini memang diperlukan kesempatan untuk mengembangkan diri dan tampil mandiri melalui otonomi yang bertanggung jawab. Tuntutan akuntabilitas pengelolaan ditingkatkan melalui proses evaluasi dan akreditasi yang berorientasi kepada kemampuan institusi untuk menjawab kebutuhan dan tantangan zaman. Pada sisi lain, penguasaan Bahasa Inggris dan atau bahasa asing lainnya menjadi *conditio sine quo non* dalam rangka pengembangan ilmu, khususnya kepada para dosen sebagai ujung tombak aktualisasi peranan institusi.

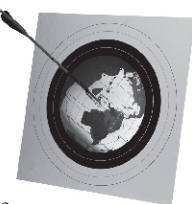
D. PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN NASIONAL SEBAGAI PROSES YANG MELIBATKAN SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI FAKTOR SENTRAL DAN STRATEGIS

Eksistensi suatu institusi pemerintah bagi pencapaian tujuan-tujuan suatu negara merdeka, menjadi andalan utama dilihat dari kepentingan-kepentingan publik. Selain memberikan pelayanan (*public service*) dan pemberdayaan (*empowerment*), pemerintah juga dituntut melaksanakan pembangunan.

Pembangunan nasional yang secara sistematis telah dilaksanakan sejak tahun 1969, merupakan serangkaian tahap yang tidak saja berlangsung dalam proses politik, tetapi juga administratif. Proses politik berlangsung di berbagai institusi infrastruktur dan suprastruktur politik dengan tujuan utama merumuskan, mengagregasikan, dan mengartikulasikan berbagai aspirasi pembangunan dari seluruh lapisan masyarakat. Proses administratif terjadi untuk menjabarkan berbagai kebijakan politik menjadi berbagai program, sasaran, dan proyek-proyek pembangunan yang bersifat operasional.

Hal itu berarti, kegiatan pemerintahan dan pembangunan membutuhkan keterlibatan manusia dengan kualifikasi tertentu. Tidak sembarang manusia yang dapat mengemban amanat penting ini. M. Alwi Dahlan (dalam Effendi, 1993) mengemukakan bahwa jenis-jenis kualitas yaitu:

- a. Kualitas kepribadian, yang perlu ada pada setiap manusia pembangunan: kecerdasan, kemandirian, kreativitas, ketahanan mental, keseimbangan antara emosi dan rasio. Dengan personalitas yang tangguh, setiap aparatur akan mudah dalam menyikapi setiap persoalan sosial yang muncul.
- b. Kualitas bermasyarakat, yang perlu dalam keselarasan hubungan dengan sesama manusia, seperti kesetiakawanan, keterbukaan. Di tengah kecenderungan hidup pragmatis saat ini, sangat diperlukan kualitas seperti ini.
- c. Kualitas berbangsa, tingkat kesadaran berbangsa dan bernegara yang semartabat dengan bangsa – bangsa lain. Pada kehidupan yang serba mengglobal, semangat kebangsaan harus tetap ditumbuhkan.
- d. Kualitas spiritual, dalam hubungan dengan Tuhan: religiusitas dan moralitas. Tanpa kualitas ini, pemerintahan dan pembangunan akan kehilangan makna.



- e. Kualitas lingkungan, yang diperlukan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan bagi seluruh generasi bangsa. Interaksi yang harmonis dengan lingkungan akan menjadi modal penting bagi kelancaran pembangunan.
- f. Kualitas karya, yang diperlukan untuk mewujudkan aspirasi dan potensi diri dalam bentuk kerja nyata menghasilkan sesuatu dengan mutu sebaik-baiknya.

Dari aspek aparatur, diperlukan juga manusia-manusia untuk berjalannya roda pemerintahan dan pembangunan yang memenuhi kriteria tertentu. Siagian mengemukakan bahwa aparatur tersebut berperan sebagai modernisasi, pelopor, inovator, katalisator, dan pelaksana pembangunan (1998:194). Dalam rangka itu, pembinaan harus dilakukan terhadap sumber daya manusia dalam pembangunan yang menurut Tjokromidjojo (1991) meliputi, pertama, yaitu keterampilan dan kemampuannya, yang dapat juga disebut sebagai kemampuan profesional dan manajerial, dan yang kedua adalah motivasi dan dedikasinya, dorongan untuk berkarya mengabdikan, melaksanakan tugas, menyelesaikan amanat. Di sini juga berorientasi pengabdian untuk negara, bangsa, dan masyarakat. Kemudian ketiga yaitu sikap mental dan etos kerja misalnya disiplin, kerja keras, produktif, *achievement orientation*, jujur, tertib dan lain-lain yang semuanya pada dasarnya meningkatkan produktivitas kerja.

Dalam menghadapi tantangan masa depan dengan penuh gejolak perubahan yang cepat, yang tentunya juga berdampak kepada proses pemerintahan dan pembangunan, menurut Emil Salim (1993) perlu diutamakan lima segi kualitas manusia dan masyarakat, yaitu ketaatan pada prinsip moral dan agama, sikap kesetiakawanan sosial dalam hubungan antar manusia, kreativitas dan produktivitas, serta pengembangan rasionalitas dan kemampuan menegakkan kemandirian.

Satu tuntutan sumber daya manusia dalam abad 21, termasuk untuk kepentingan pemerintahan dan pembangunan adalah manusia unggul. Menurut Tilaar (1999) jenisnya adalah keunggulan individualistik dan keunggulan partisipatoris. Keunggulan individualistik adalah manusia yang unggul tapi hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Manusia tipe ini adalah manusia rakus yang

saling mematikan satu dengan yang lain (*homo homini lupus*). Manusia dengan keunggulan partisipatoris adalah manusia yang ikut serta aktif dalam persaingan yang sehat untuk mencari yang terbaik.

Sangat wajar dan proporsional terdapat tuntutan untuk munculnya kualitas manusia seperti itu. Sebab aktivitas pemerintahan dan pembangunan antara lain melibatkan berbagai sumber daya yang luar biasa besarnya. Bila ditangani oleh orang yang tidak profesional, tanpa komitmen tinggi dan tidak berintegritas akan menimbulkan kerugian dan kehancuran suatu pemerintahan.

Dalam pembangunan menurut K. Mueller (dalam Kristiadi, 1997), diperlukan manajer-manajer pembangunan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. *An orientation toward people*

Di masa mendatang aparatur pemerintahan sebagai faktor manusia baik yang berada dalam organisasi maupun luar organisasi, harus ditingkatkan dalam mengayomi dan melayani masyarakat. Harus terjadi transformasi struktural dan kultural pada semua jajaran pemerintahan untuk mendukung ini.

b. *A concern with implementation*

Pimpinan harus dapat memastikan bahwa segala sesuatunya agar terjadi sebagaimana yang direncanakan. Keberhasilan implementasi memerlukan keterpaduan antara kemampuan manajerial dengan kemampuan teknis. Dalam konteks ini, diperlukan munculnya kualifikasi pimpinan yang mampu memberdayakan (*empowering people*).

c. *A competitive spirit*

Dengan memperhatikan pengaruh modernisasi, globalisasi dan persaingan dunia yang semakin ketat, kemampuan bersaing dalam memberikan pelayanan prima akan sangat menentukan bagi keberhasilan pimpinan dalam mencapai tujuan organisasi, khususnya dalam konteks pembangunan. Semangat ini termasuk untuk terus menerus meningkatkan kapabilitas diri.

d. *An orientation toward system*

Adanya kesadaran pimpinan bahwa pelaksanaan pembangunan akan ditandai oleh satu kondisi saling keterkaitan dan bersifat kompleks, yang menyebabkan

pengambilan keputusan harus dilakukan serentak diantara berbagai organisasi. Sudah saatnya berpikir fragmentaris dan sektoral diakhiri, sehingga diperoleh hasil yang komprehensif.

e. *Pragmatism, flexibility and an ability to deal with ambiguity*

Dalam situasi yang tidak menentu dan mudah berubah, kemampuan berfikir secara pramatis, keluwesan dan kemampuan memadukan berbagai hal yang dihadapi secara serentak merupakan salah satu kunci keberhasilan pimpinan dalam manajemen modern, khususnya untuk kepentingan pemerintahan dan pembangunan nasional.

f. *An orientation toward the future*

Dengan keterbatasan waktu yang dihadapi oleh setiap pimpinan, mengharuskan dirinya untuk mengambil keputusan yang tepat dengan perhitungan berbagai faktor di masa depan. Harus ditumbuhkan kesadaran baru bahwa sumber-sumber daya yang dikelola saat ini adalah pinjaman dari generasi yang akan datang, dan kerja keras hari ini adalah investasi untuk generasi yang akan datang.

Setelah mencermati hal-hal tersebut jelas kiranya bahwa keterlibatan unsur manusia dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan merupakan faktor sentral dan strategis. Keterlibatan ini tidak saja dalam kapasitas sebagai aparatur, tetapi juga sebagai warga masyarakat pada umumnya.

E. KONTRIBUSI NYATA PENDIDIKAN TINGGI DALAM PENYIAPAN SUMBER DAYA MANUSIA BAGI KELANCARAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Menurut Tilaar (1999), pendidikan tinggi mempunyai fungsi yang berlapis, yaitu:

a. Pendidikan tinggi sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia

Sebagai fungsi klasik dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan kemampuan pribadi dan kemampuan riset bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan bagi perbaikan mutu kehidupan manusia. Hal ini memberi kontribusi lahirnya pimpinan masa depan yang berkemampuan berfikir, bekerja, dan mencipta. Produk pendidikan tinggi dalam berbagai

keahlian, kemampuan, dan spesifikasi, saat ini telah menyebar pada berbagai sektor kehidupan masyarakat dan pembangunan nasional. Dalam rangka ini perlu terus dipertahankan sinkronisasi antara produk perguruan tinggi dengan kebutuhan pembangunan.

b. Pendidikan tinggi dalam pembangunan daerah

Pendidikan tinggi tidak terlepas tanggung jawabnya bagi pembangunan daerah tempat pendidikan tinggi itu hidup. Pendidikan tinggi masa depan harus menangani masalah-masalah yang hidup di sekitarnya, menangani pembangunan daerah sekitarnya sehingga dengan demikian merupakan jaringan dalam pembangunan nasional. Dalam konteks ini, pendidikan tinggi khususnya yang berada di daerah-daerah dapat menjadi *think tank* dan *center of excellence*. Otonomi daerah saat ini telah membuka peluang sangat besar bagi aktualisasi peran ini.

c. Pendidikan tinggi dalam pembangunan nasional

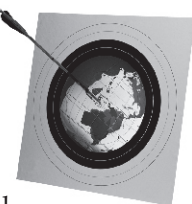
Fungsi ini telah lama dilaksanakan oleh jaringan pendidikan tinggi, meskipun harus ditingkatkan kualitasnya. Perpaduan antara potensi dan aktualisasi pendidikan tinggi yang berada di daerah-daerah dengan yang berada di pusat, khususnya kota-kota besar di Jawa harus mendapat perhatian serius. Untuk itu, jalinan kerjasama termasuk dalam penyediaan sumber daya manusia berkualitas bagi pembangunan, merupakan sesuatu yang harus menjadi kenyataan. Penggunaan teknologi mutakhir dalam rangka ini menjadi suatu kebutuhan.

d. Pendidikan tinggi dalam kerja sama regional

Kerjasama regional, misalnya dalam rangka ASEAN menuntut tingkat kualitas pendidikan tinggi, termasuk di daerah-daerah. Peningkatan ini menjadi suatu keniscayaan, supaya dapat berpartisipasi penuh dan bersaing dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi di negara-negara jiran dalam rangka kerjasama internasional. Sudah saatnya perguruan tinggi domestik mengembangkan sayap dengan program-program yang semakin beragam.

e. Pendidikan tinggi dalam kerja sama serta persaingan global

Kerjasama ini merupakan suatu bentuk baru yang perlu dipacu sekaligus menarik para pakar dari negara luar dalam pengembangan



pendidikan tinggi di tanah air. Kualitas sumber daya manusia yang diharapkan muncul secara menonjol dalam pembangunan nasional hanya akan muncul apabila jaringan kerjasama ini menjadi suatu program nyata pendidikan tinggi di tanah air. Manusia-manusia unggul di era global hanya akan lahir di tanah air kita dalam mendukung program-program pembangunan nasional apabila kolaborasi dengan pendidikan tinggi- pendidikan tinggi di luar negeri khususnya yang mempunyai reputasi unggulan menjadi program yang diimplementasikan dengan sungguh-sungguh oleh perguruan tinggi di tanah air kita.

Dengan kata lain, berbicara perguruan tinggi adalah berbicara tantangan dan masa depan. Tidak mengherankan apabila Duderstaat (2000) mengemukakan bahwa *the complexity of our world, the impact of technology, the insecurity of employment, and the uncertainty of our times have led all sectors of our society to identify education in general.*

Esensi dari upaya-upaya konkrit tersebut sebagai wujud nyata keterlibatan perguruan tinggi dalam membangun sumber daya manusia untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan adalah bagaimana agar manusia-manusia Indonesia yang dilahirkan sebagai produk perguruan tinggi sadar akan hak dan martabatnya sebagai manusia merdeka. Selaras dengan itu, dikemukakan Tjokrowinoto (1996), bahwa salah satu dimensi pembangunan adalah *human capital development*, yang menekankan pentingnya *empowerment* manusia, kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensinya sebagai manusia.

F. PENUTUP

Perguruan tinggi sebagai institusi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi mempunyai peran dan kontribusi positif terhadap penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas yang diperlukan dalam proses pemerintahan dan pembangunan nasional. Tridharma Perguruan Tinggi sebagai aktivitas utamanya, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan aktualisasi nilai-nilai luhur pendirian awal institusi perguruan tinggi yang harus tetap dijaga keberlangsungannya.

Tugas utama perguruan tinggi, khususnya di bidang perguruan merupakan implementasi nyata investasi sumber daya manusia yang berjangka panjang (*human investment*). Sumber

daya manusia ini merupakan human capital yang perlu secara terus menerus ditingkatkan kemampuannya sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, pemerintahan, dan pembangunan.

Pembangunan sebagai proses multidimensional, memerlukan keterlibatan aktif masyarakat pada berbagai aspek, baik sebagai perencana, pelaksana maupun sebagai pengawas pembangunan. Keterlibatan ini akan lebih bermakna bila keterlibatan ini didukung oleh kualifikasi tertentu. Lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan akan berdampak nyata pada upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat dan bangsa.

REFERENSI

- Becker, Gary S. 1993. *Human Capital A.Theoretical and Emperical Analysis With Special Reference to Education*. Third Edition. Chicago.: The University Press.
- Duderstaat, James J. 2000. *A University for The 21 ST Century*. Ann Arbor the University of Michigan Press.
- Dunn, William N. 1981. *Public Policy Analysis An Introduction*. Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffts.
- Dye, Thomas R. 1987. *Understanding Public Policy*. Sixth Edition. New Jersey. Prentice Hall Inc.
- Efendi, Sofian, Syafri Sairin dan M Alwi Dahlan. 1993. *Membangun Martabat Manusia Peranan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Pembangunan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres.
- John, Roe L. & Edgar L. Morphet. 1995. *The Economics and Financing of Education. A System Approach*. Third Edition. New Jersey: Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffts.
- Kristiadi, J. B. 1997. *Dimensi Praktis Manajemen Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: STIA Press.
- Narayanan, V. K, dan Raghu Nath. 1993. *Organization Theory. A Strategic Approach*. Homewood: Richard D. Irwin, Inc.
- Robbins, Stephen R. 1990. *Organization Theory: Structure, Designs and Applications*. Third Edition. Englewood Cliffts: Prentice Hall International Inc.
- Siagian, Sondang, P. 1998. *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Supriadi, Dedi. 1997. *Isu dan Agenda Pendidikan Tinggi di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Supriyoko, Ki. 2001. *Menuju Perguruan Tinggi Indonesia Berkelas Dunia*. Bandung: Pikiran Rakyat, 2 Januari 2001.
- Tilaar H.A.R. 1999. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21*. Magelang: Indonesia Tera.

- _____. 1999. *Manajemen Pendidikan Nasional. Kajian Pendidikan Masa Depan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1991. *Manajemen Pembangunan*. Jakarta: CV. Masagung.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1996. *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar